



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Kejati Tunggu Jawaban Kemendagri, Kasus TPP Seluma

**RBI, BENGKULU** - Kasus Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di kabupaten Seluma yang terindikasi merugikan negara Rp 12 Miliar itu hingga sekarang terus belajut. Sebab, perkembangan terbaru sejauh ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, sudah mengutus tim berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta untuk mempertanyakan payung hukum terkait dengan pengucuran TPP di Kabupaten Seluma tahun 2017 tersebut.



**Baginda Polin Luman Gaol**

"Ya, kemarin Pak Aspidsus, Hendri Nainggolan SH, MH sudah mengatakan bahwa tim kita sudah meluncur ke Kemendagri Jakarta. Sudah satu minggu yang lalu tim berangkat," ucap Kajati Bengkulu, Baginda Polin Luman Gaol SH, MH melalui Kasi Penkum Ahmad Fuadi SH ke RADAR BENGKULU melalui telcpon seluler Minggu, (29/4).

Dikatakan Fuadi, sekarang pihaknya masih menunggu jawaban dari Kemendagri terkait dengan aturan pengucuran TPP di Kabupaten Seluma tahun 2017 yang jauh lebih besar dari TPP di Pemda Provinsi tersebut. Diakuinya, hingga sekarang tim Penyidik belum mendapat jawaban

ril dari Kemendagri terkait dengan aturan TPP tersebut. "Intinya sekarang ini kita masih menunggu jawaban dari Kemendagri dan Dirjen anggaran masalah payung hukum pengucuran TPP yang mencapai Rp 50 Miliar tersebut. Yang jelas kita dari Kejati Bengkulu yang menangani perkara ini akan bekerja dengan maksimal, nantilah kita lihat perkembangan selanjutnya setelah aa jawaban dari Kemendagri," imbuhnya.

Untuk diketahui, kasus tersebut mulai mencuat sejak adanya protes dan kesenjangan dari Organisasi Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Seluma terkait dengan besaran TPP tersebut. Sehingga besaran TPP itu dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk memastikan apakah ada indikasi kesalahan atau tidak. Sementara Kejati yang sudah melidik perkara tersebut sejauh ini sudah pernah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Seluma. Diantaranya, Asisten I Pemkab Seluma Mirin Ajib, Kabid pada BPKAD Pemkab Seluma, dan juga beredar kabar bahwa Sekda pada Pemkab Seluma juga sudah pernah dimintai keterangan terkait dengan TPP tersebut.(ide)